

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari kas basis menuju akrual basis yang mengakomodir transaksi ekonomi untuk diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan, maka dibutuhkan sebuah sistem yang handal guna mewujudkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Terhadap Penyajian Laporan Keuangan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, pengamatan/ observasi, dokumentasi serta triangulasi. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif komparatif. Landasan teori yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual pada UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, karena masih ada beberapa tahapan dari siklus akuntansi yang masih harus dibenarkan. Dalam pencatatan laporan keuangannya masih menggunakan basis kas untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat di Buku Kas Umum (BKU). Sehingga perlu disempurnakan agar penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut dapat dilaksanakan dan dievaluasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, SIA Pengelolaan Keuangan, Berbasis Akrual, Kas basis, Akrual Basis, Penyajian Laporan Keuangan, Siklus Akuntansi, Buku Kas Umum.

ABSTRACT

Government Regulation Number 71 of 2010 about Accrual-based Government Accounting Standard (SAP), changes the based direction of government accounting basis in Indonesia from cash based to accrual based accounting that accommodate economic transaction to be recognized, recorded and presented in the financial statement at the time the transaction, regardless of time when cash is received or paid out, a reliable system is needed to realize compliance with Accrual Based Government Accounting Standards. Research by title '**Analysis of Application of Regional Financial Management Information System Application for Accrual Based on the Presentation of Financial Statements at UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo**'. The purpose of this research is to find out how the application of the Accrual Based Regional Financial Management Information System Application and the obstacles encountered in applying the Accrual Based Accounting Standards. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data with data collection techniques in the form of interviews, observations / observations, documentation and triangulation. Data will be analyzed by comparative descriptive method. The theoretical basis used is Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-based Government Accounting Standards (SAP) and Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013. From the results of this study it can be concluded that the application of the Accrual-Based Regional Financial Management Information System Application in the Protection and UPT Sidoarjo Toddler Child Care Services have been implemented but have not been in accordance with Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2013, because there are still several stages of the accounting cycle that still need to be justified. In recording the financial statements still use the cash basis to record transactions that result in cash receipts and cash disbursements are recorded in the General Cash Book. So it needs to be refined so that the application of the regional financial accounting system can be implemented and evaluated with the Minister of Home Affairs Regulation number 64 of 2013.

Keywords: Government Accounting Standards, Financial Management AIS, Accrual Based, Cash basis, Accrual Basis, Presentation of Financial Statements, Accounting Cycles, General Cash Book